

EDISI III TAHUN 2011

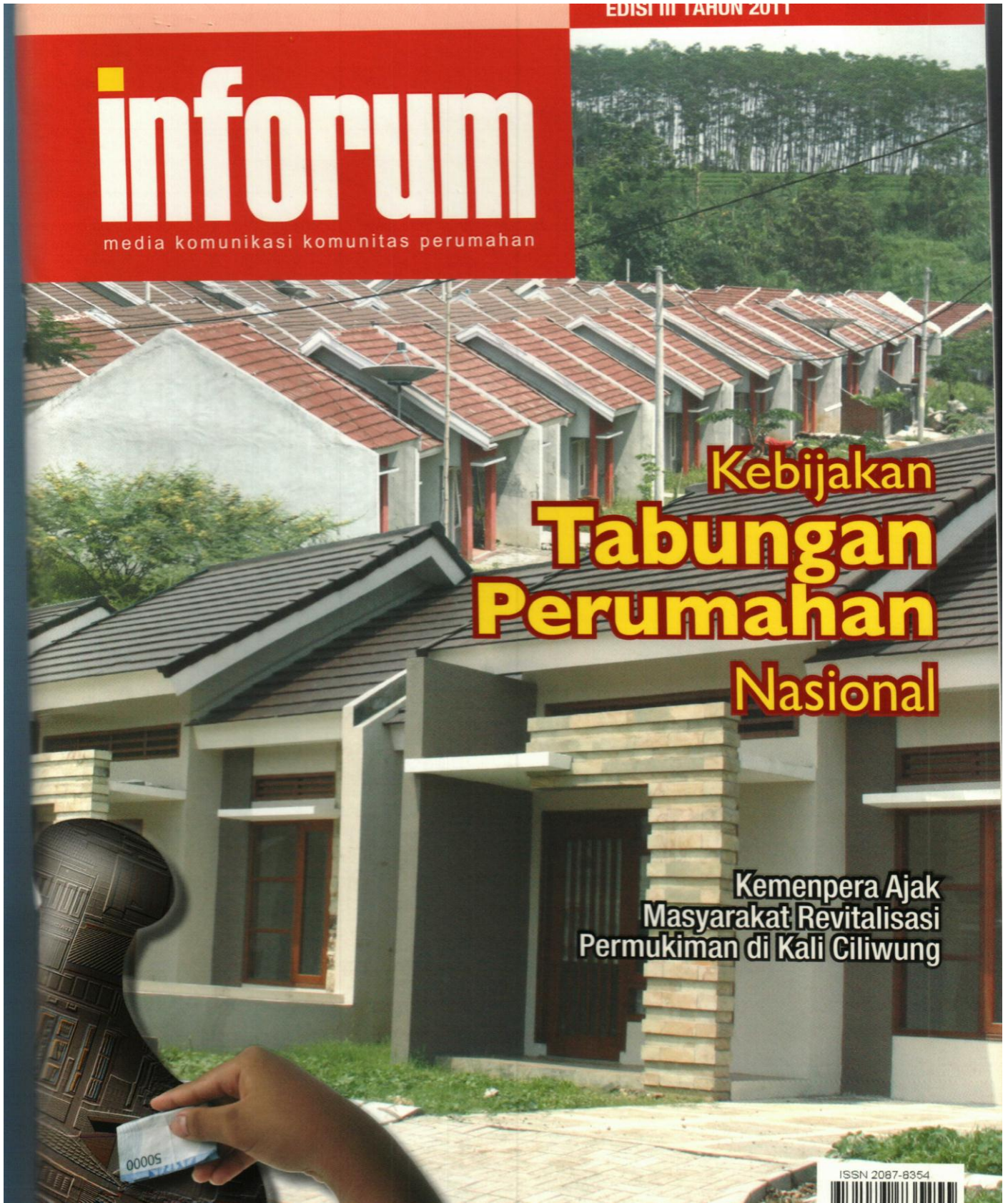
inforum

media komunikasi komunitas perumahan

Kebijakan **Tabungan Perumahan Nasional**

**Kemenpera Ajak
Masyarakat Revitalisasi
Permukiman di Kali Ciliwung**

ISSN 2087-8354



inforum

media komunikasi komunitas perumahan

Pelindung
Menteri Perumahan Rakyat

Penasehat Redaksi
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Deputi Bidang Perumahan Formal

Pemimpin Redaksi
Oswar M. Mungkasa

Dewan Redaksi
Rifaed M. Nur
Hardi Simamora
Eko D. Heripoerwanto
Lukman Hakim

Redaksi Pelaksana
Moch. Yusuf Hariagung
Eko Suhendratma
David Agus Sagita

Penyunting dan Penyelaras Naskah
Hotman Sahat Gayus
Leonardus P. Harryadhi

Reporter
Akbar Pandu Pratamalistyia
Ristyan Mega Putra

Desain dan Produksi
Aris Karnadhi
Ruby Marchelinus
Agus Sumarno

Distribusi
Saiful Anwar
Nurul Prihatin
Fenty Meilisyia S.
Jadima Lumban R.
Riesa Anandya

Promosi dan Pameran
Arief Karyawan
Jafry
Tri Pujiastuti
Sri Rahmi Purnamasari
Pustika Chandra Kasih
Rossi Dwi A.

Kontributor
Lusia Nini Purwajati
Ridho Fauzy

Koresponden
R. Budiono Subambang
Toni Rusmarsidik B. Ekoputro
Cut Lisa
Bambang Sucipto Yuwono

Pergudangan dan Logistik
Ahmad Sudibyo

Alamat Redaksi Inforum:
Bagian Humas dan Protokol
Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Telp./Fax. : (021) 7264786/72800145
Email : majalah.inforum@kemenpera.go.id
Website : www.kemenpera.go.id

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 2.000 kata.

Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email: majalah.inforum@kemenpera.go.id atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id

Desain cover: Agus Sumarno

Foto cover depan: Inforum/Ristyan Mega Putra

Dari Redaksi

Tidak terasa tahun 2012 telah menjelang, dan *Inforum* kali ini merupakan edisi terakhir pada tahun 2011. Tentu saja banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh *Inforum*. Diantaranya semakin luasnya jangkauan *Inforum*, yang terlihat dari beragamnya surat masuk ke Redaksi. Mulai dari Duta Besar, pemerhati, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Hal ini tidak terlepas dari upaya pengelola *Inforum* membenahi sistem distribusi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, peningkatan kualitas materi *Inforum* pun tetap mendapat perhatian dengan melibatkan tenaga berpengalaman dalam susunan dewan redaksi, walaupun seluruhnya masih berasal dari internal Kemenpera. Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan kami pada tujuan keberadaan *Inforum* sebagai pembawa pesan dari dan untuk pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam beberapa bulan terakhir, di antara gegap gempita pembangunan perumahan, menyeruak isu tabungan perumahan. Hal ini tidak terlepas dari sedang berlangsungnya upaya penyusunan Undang-Undang Tabungan Perumahan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Inforum* ingin memanfaatkan momentum ini dengan baik. Sebagai bagian dari keluarga besar pemangku kepentingan pembangunan perumahan, *Inforum* turut berupaya memberi sumbangsih dengan memanfaatkan keberadaannya untuk menjadi saluran penyampaian aspirasi terkait penyusunan undang-undang tersebut.

Disadari betul bahwa pemikiran dan pandangan yang berseliweran di sekitar kita perlu diwadahi agar dapat tersalurkan kepada pemerintah dan legislatif yang berkuat menyelesaikan undang-undang ini. Adapun pemikiran dan pandangan dari berbagai pihak tersebut, kami kemas dalam beberapa bentuk rubrik diantaranya laporan utama, opini, wawancara, termasuk juga manajemen pengetahuan dengan menampilkan sumber-sumber informasi terkait berupa situs internet. Upaya ini setidaknya kami harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan penerimaan masyarakat terhadap isi Undang-Undang Tabungan Perumahan kelak.

Akhir kata, kami mewakili pengelola dan dewan redaksi *Inforum* menyampaikan selamat tahun baru 2012. Semoga di tahun mendatang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.

Perumahan yang Layak Sebagai Hak Asasi Manusia

Susi Dwi Harijanti

...sidering all of the relevant circumstances. No legislation may permit arbitrary evictions.

Dalam skala internasional hak atas perumahan yang layak terdapat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjelaskan 'Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including housing'. Selanjutnya, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menyatakan '...the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing...'. Pengakuan hak atas perumahan yang layak juga terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional, misalnya, Konvensi Hak-hak Anak, Konvensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Hak atas perumahan yang layak dalam DUHAM dan KIHESB harus dipahami dalam kaitan dengan hak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan (*the right to a standard of living adequate for health and well-being*). Bahkan dikatakan bahwa hak atas standar kehidupan yang layak ini merupakan inti dari hak-hak sosial (*social rights*). Guna memenuhi hak atas standar kehidupan yang layak dibutuhkan hak-hak lanjutannya, yakni hak atas makanan dan nutrisi yang layak, hak atas sandang, hak atas perumahan yang layak serta hak atas perlindungan.

Aspek-aspek Kunci

Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations High Commissioner for Human Rights*) – sekarang telah berubah menjadi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*Human Rights Council*) – melalui *Fact Sheet* Nomor 21/Rev 1 menjelaskan beberapa aspek kunci hak atas perumahan yang layak.



Sketsa oleh Wiryadi Sabdatama

Secara nasional dan internasional, hak atas perumahan yang layak (*the right to adequate housing*) telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Di Indonesia, misalnya, hak atas perumahan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'setiap orang berhak... bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...'. Pasal 40 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa 'setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak'. Di negara lain, misalnya, Afrika Selatan, hak tersebut diatur secara lebih tegas dalam Pasal 26 Konstitusi 1996 dengan mengata-

Everyone has the right to have access to adequate housing.

The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to achieve the progressive realization of this right.

No one may be evicted from their home, or have their